

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL
PADA PERJANJIAN FIDUSIA DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015**

TESIS

Oleh:
JANDRI HARDING HERCULES ISIDORUS
201420252011



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

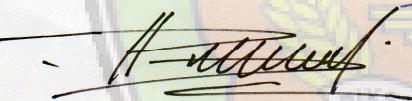
JudulTesis : Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
NamaMahasiswa : Jandri Harding Hercules Isidorus
NomorPokokMahasiswa : 201420252011
Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Pidana

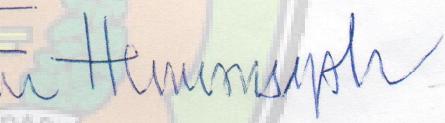
Jakarta, 13 Januari 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin S.H., M.H.
NIDN:0311026802


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.
NIDN: 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

JudulTesis : Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
Nama Mahasiswa : Jandri Harding Hercules Isidorus
Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252011
Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus UjianTesis: 13 Januari 2018

Jakarta, 13 Januari 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Boy Nurdin S.H., M.H.
NIDN:0311026802

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis S.H., M.H.
NIDN: 0323015604

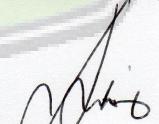
Penguji II : Prof. I Made Widnyana S.H., M.H.
NIDK: 9903252950

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Direktur Pascasarjana


Dr. Dwi Atmoko S.H., M.H.
NIDN: 0316077604


Dr. Anton Wachidin Widjaja S.E., M.M.
NIDN: 0311116501

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

“Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Perjanjian Fidusia Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 13 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Jandri Harding Hercules Isidorus
NPM: 201420252011

ABSTRAK

Tesis ini adalah berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Perjanjian Fidusia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”. Metode penelitian adalah dengan yuridis normatif atau berpijak pada peraturan hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam hal kekuatan eksekutorial secara langsung jika debitör wanprestasi, maka kreditor bisa melakukan eksekusi secara langsung, dengan catatan segala syarat dan ketentuan dalam aturan perundangan-undang sudah terpenuhi semua. Akan tetapi dalam faktanya, masih banyak kreditor yang tidak taat dengan aturan perundangan-undangan, khususnya dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Terhadap hal tersebut, maka debitör yang dirugikan, sebab tidak jarang dalam pelaksanaan eksekusi secara langsung, pihak kreditor menyewa jasa pihak ketiga yang dalam bertindak sering melakukan perbuatan anarkis. Perlindungan konsumen juga demikian rendah, bahwa posisi dan kedudukan konsumen dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia lemah. Budaya konsumen yang pasrah dan tidak melakukan complain kepada kreditor manakala terjadi tindakan kerugian juga masih minim. Berbagai laporan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional menunjukkan posisi konsumen yang rentan untuk dieksplorasi oleh para pelaku usaha. Terhadap hal tersebut, maka pemerintah harus melakukan tugasnya, termasuk di dalamnya adalah sosialisasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Pelaksaan Eksekui Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, kreditor, debitör.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Juridical Analysis Against The Executorial Strengths On The Fiduciary Agreement In Review Of Government Regulation Number 21 of 2015". The research method is normative juridical or based on existing law regulation, in this case is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security and its derivative rule that is Government Regulation Number 21 Year 2015 concerning Procedure of Registration of Fiduciary Guarantee and Fiduciary Cost of Fiduciary Collateral . In the case of direct executorial power if the debtor is defaulted, the creditor can execute directly, provided that all conditions and conditions in the legislation rules have been fulfilled. However, in fact, there are still many creditors who are not obedient to the rules of legislation, especially in registering Fiduciary Guarantee in Fiduciary Security Registration Office. To that end, the debtor is harmed, because it is not uncommon in the implementation of direct execution, the creditor hires the services of third parties who in acts often perform anarchist acts. Consumer protection is also so low, that the position and position of consumers in the fiduciary guarantee financing agreement is weak. Consumer culture that resigned and did not do complain to the creditors whenever the loss action is also still minimal. Reports from the National Consumer Protection Agency show the position of vulnerable consumers to be exploited by business actors. To that end, the government must perform its duties, including the socialization of the Regulation of the Chief of Police Number 8 Year 2011 on the Security of Execution of Execution Fiduciary Guarantee.

Keywords: Fiduciary Guarantee, creditors, debtor.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan bimbingannya maka penulis dapat menyusun proposal tesis ini dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Perjanjian Fidusia Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015**. Masalah fidusia termasuk dalam ranah hukum jaminan yang sudah lama di kenal di Indonesia. Cara kerjanya adalah biasanya lembaga pembiayaan memberikan kucuran kredit kepada nasabah. Barang yang akan dikredit dan paling popular adalah kendaraan roda dua, kendaraan roda empat atau peralatan elektronik.

Untuk mendapatkan barang tersebut, masyarakat tidak perlu membayar tunai, melainkan barang sudah disediakan oleh perusahaan pembiayaan dan setiap bulan masyarakat mengangsur secara berkala. Dalam pelaksanannya, tentu saja tidak selamanya kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Terlebih jika debitör cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya kepada kreditor. Disinilah masalah muncul.

Kekuatan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam masalah fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan. Artinya pihak kreditor bisa langsung melakukan eksekusi tanpa mendaftarkan diri ke pengadilan. Hal yang menjadi masalah, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, pihak kreditor selalu menggunakan jasa pihak ketiga yang dikenal dengan sebutan *debt collector*. Tidak jarang upaya eksekusi dilakukan dengan paksa, brutal dan arogan yang menyebabkan kerugian pada debitör.

Tesis ini akan mengkaji pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusia. Sejauhmanakah pelaksanaan eksekutorial jaminan fidusia sudah sejalan dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan. Kemudian sejauh manakah undang-undang memberikan perlindungan kepada konsumen.

Bekasi, Januari 2018

Jandri Harding Hercules Isidorus

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrack</i>	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Masalah.....	9
1.2.1 Batasan Masalah	10
1.2.2 Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
1.4. Kerangka Teoritis.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	28
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data	28
1.5.2 Analisa Data.....	28
1.6. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Sejarah Fidusia.....	30
2.2.Sejarah Fidusia di Indonesia.....	34

2.3. Tinjauan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	38
2.3.1Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	42
2.3.2 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	46
2.3.3 Hak Mendahului Pemegang Fidusia	49
2.3.4 Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999	54
2.3.5 Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999	61
2.4. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.....	68
2.4.1 Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	71
2.4.2 Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	75
2.4.3 Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	78
2.5. Tinjauan Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011.....	83
2.5.1 Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi	84
2.5.2 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	86

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA PERJANJIAN FIDUSIA

3.1 Pembahasan Mengenai Hukum Jaminan di Indonesia	90
3.2 Pembahasan Prestasi dan Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia.....	98
3.3 Pembahasan Kekuatan Eksekutorial Terhadap Objek Jaminan Fidusia.....	111
3.3.1Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011	109
3.3.2 Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Akta Bawah Tangan	117
3.3.3 Larangan Pengalihan Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 376/PID/2012/PT.MDN	119

BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JAMINAN FIDUSIA

4.1 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	127
4.2 Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.....	129
4.3 Mekanisme Penyelesaian Debitor Bermasalah dan Perlindungan Terhadap Konsumen	135
4.3.1 Badan Hukum Perlindungan Konsumen	140
4.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	145
4.4 Analisis Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Jaminan Fidusia. .	149

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	164
5.2 Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA	168

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS